

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu kegiatan ekonomi dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Alat Ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat pada tingkat daerah disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nurhasanah et al., (2024). Nilai PDRB ini akan menjelaskan kemampuan daerah dalam mengelola atau menggunakan sumber daya yang ada.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator ekonomi utama yang mengukur total nilai tambah dari semua unit usaha atau total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan di suatu wilayah. PDRB digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. Dengan data PDRB atas dasar harga konstan, kita dapat menghitung laju pertumbuhan ekonomi dan menjadikannya sebagai landasan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di masa mendatang (Patanduk et al., 2019).

Besaran PDRB suatu daerah sangat dipengaruhi oleh cara daerah tersebut mengelola sumber daya alamnya. Oleh karena itu, potensi sumber daya alam dan faktor produksi yang dimiliki setiap daerah akan menentukan seberapa besar PDRB yang dihasilkan. Keterbatasan pada faktor-faktor ini menyebabkan PDRB setiap daerah menjadi bervariasi (Bancin & Usman, 2020).

PDRB dapat mengukur pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu daerah. Dengan menganalisis PDRB, pemerintah dapat memetakan sektor-sektor yang

berkontribusi paling besar terhadap perekonomian, serta mengidentifikasi perubahannya dari waktu ke waktu. Secara sederhana, semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah, semakin maju pembangunan ekonominya. Sebaliknya, PDRB yang rendah mengindikasikan adanya perlambatan atau penurunan dalam pembangunan ekonomi daerah tersebut (Wida & Saharuddin, 2022).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), secara konsisten dalam kurun waktu dari tahun 2019-2023. PDRB tertinggi di Indonesia dicapai oleh DKI Jakarta sebesar 205.046.597.018 Milliar rupiah. Dilihat dari data laju pertumbuhan ekonomi, tidak semua provinsi mengikuti arah pertumbuhan nasional. Hanya beberapa wilayah yang mengikuti fluktuasi pertumbuhan ekonomi nasional . provinsi tersebut adalah Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatra Selatan, dan Riau. Sedangkan PDRB yang terendah dicapai oleh provinsi Gorontalo yaitu sebesar 31.677.601,52 Juta rupiah.

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh besarnya investasi, di mana peningkatan output suatu negara/daerah akan meningkatkan pertumbuhan tersebut karena berbagai faktor. Jika negara maju lebih mengandalkan hasil produksi dan investasi berupa barang dan jasa, negara berkembang justru membutuhkan peran investasi sebagai faktor pendukung esensial untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkembang (Sanjani & Sari, 2024).

Investasi adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi nilai suatu daerah. Melalui investasi, penanaman modal digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, yang secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (Febrianto & Arifin, 2025). Masuknya investasi akan mendorong kegiatan ekonomi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

Investasi pemerintah sering disebut juga investasi sektor publik. Definisi investasi pemerintah menurut peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 adalah penempatan sejumlah dana atau aset oleh pemerintah pusat atau daerah dalam jangka panjang. Tujuannya adalah untuk investasi mendapatkan kembali nilai pokok investasi, ditambah manfaat ekonomi, sosial atau manfaat lainnya dalam priode waktu tertentu (Nurhayati, 2015).

Investasi pemerintah dalam hal ini, sesuai Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, berfokus pada penggunaan aset tetap yang diperoleh melalui belanja modal. Sehingga pada penelitian ini variabel investasi pemerintah menggunakan data belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembelian atau pengadaan aset tetap seperti tanah, peralatan, gedung dan lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan untuk kegiatan pemerintahan (Waryanto, 2017).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, investasi pemerintah yang menjadi fokus dalam penelitian ini secara spesifik merujuk pada investasi fisik. Investasi ini mencakup pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti

jalan, jembatan, dan sistem transportasi, serta pengadaan aset fisik jangka panjang lainnya, termasuk tanah, gedung, dan fasilitas publik. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah pada alokasi dana pemerintah untuk menciptakan modal fisik yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi.

Salah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih relevan untuk digunakan adalah teori Harrod-Domar tentang tabungan dan investasi. Teori ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Apabila tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah juga akan rendah dan sebaliknya (Kurniawan, 2016).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Investasi pemerintah mengalami peningkatan yang tidak stabil dari tahun 2019-2023. Investasi pemerintah tertinggi dicapai oleh provinsi DKI Jakarta sebesar 13.703.221.171 Milliar rupiah sedangkan investasi terendah terdapat di provinsi Gorontalo yaitu sebesar 218.803.282 Juta rupiah. Semakin meningkat investasi pemerintah dapat meningkatkan laju pertumbuhan PDRB. Akan tetapi fenomena yang terlihat disaat tahun 2020 ketika investasi pemerintah mengalami penurunan justru PDRB yang meningkat. Sebagian besar provinsi mengalami fenomena yang sama yaitu ketika investasi pemerintah meningkat justru PDRB terjadi penurunan dan sebaliknya, kecuali di provinsi Sumatra Barat, Riau, Jambi, Lampung dan Jawa Tengah.

Fenomena menarik di mana peningkatan investasi pemerintah tidak selalu sejalan dengan peningkatan PDRB, bahkan terkadang berbanding terbalik seperti

yang terjadi di tahun 2020, dapat dijelaskan oleh beberapa faktor kompleks. Penurunan investasi pemerintah di tahun 2020 disebabkan oleh realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, di mana fokus bergeser ke belanja konsumsi pemerintah dan bantuan sosial yang secara langsung mendorong daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen signifikan dari PDRB. sementara provinsi seperti Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, dan Jawa Tengah mungkin memiliki struktur ekonomi yang lebih tangguh atau investasi pemerintah yang memang lebih tepat sasaran sehingga menunjukkan korelasi yang lebih searah.

Penelitian yang dilakukan oleh Patanduk et al., (2019), investasi pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB provinsi Sulawesi Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Febrianto & Arifin, (2025) investasi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan Salma Athilla & Aida, (2025) Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Indonesia. Widiyarto, (2024), bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di provinsi Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan Sieskawati et al., (2024), bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di provinsi jambi.

Selain investasi pemerintah, konsumsi rumah tangga juga dapat mempengaruhi PDRB. Sukirno (2012) dalam bukunya menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang juga dikenal sebagai konsumsi rumah tangga dalam makro ekonomi, adalah total nilai yang dibelanjakan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan selama satu tahun.

Ketika rumah tangga menerima pendapatan, mereka menggunakannya untuk berbagai keperluan. Sebagian besar dari pendapatan tersebut digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, dalam hal ini pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dimaksud adalah rata-rata pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan di daerah perkotaan dan perdesaan (BPS, 2019)

Menurut pandangan utama teori keynes yang berpendapat bahwa pengeluaran agregat, yaitu pembelanjaan masyarakat ke atas barang dan jasa adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu daerah (Sukirno, 2015) Artinya, ketika konsumsi rumah tangga meningkat maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan meningkat.

Secara umum, pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli Masyarakat. Peningkatan tersebut di dorong oleh peningkatan pendapatan dan optimisme ekonomi, Dimana jika Masyarakat optimis terhadap kondisi ekonomi masa depan, mereka cenderung lebih banyak mengkonsumsi BPS (2023)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023. Konsumsi rumah tangga tertinggi dicapai oleh provinsi DKI Jakarta sebesar 1.198.581.085,77 Milliar rupiah sedangkan yang terendah terdapat di provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar 11.085.174,54 Juta rupiah. Semakin meningkat pengeluaran konsumsi rumah tangga yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat maka akan meningkat pula

laju pertumbuhan PDRB di Indonesia. Akan tetapi fenomena yang terlihat pada tahun 2020 di saat pengeluaran konsumsi rumah tangga menurun pertumbuhan PDRB juga terjadi penurunan. Sebagian besar provinsi mengalami fenomena yang sama . Namun, terdapat pengecualian di beberapa provinsi. Di Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat, terjadi fenomena yang berbeda, yaitu ketika konsumsi rumah tangga meningkat, PDRB justru mengalami penurunan. Sementara itu, di Provinsi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, terjadi fenomena yang berlawanan, yaitu ketika konsumsi rumah tangga menurun, PDRB justru mengalami peningkatan.

Fenomena antara konsumsi rumah tangga dan PDRB yang tidak selalu searah, bahkan kadang berlawanan di beberapa provinsi, mencerminkan dinamika ekonomi yang kompleks. Penurunan konsumsi rumah tangga di tahun 2020 yang sejalan dengan penurunan PDRB sebagian besar provinsi dapat dijelaskan oleh dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial yang menekan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Namun, di provinsi seperti Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat, peningkatan konsumsi rumah tangga yang justru terjadi penurunan PDRB bisa jadi indikasi adanya inflasi yang mendorong nilai nominal konsumsi tanpa peningkatan volume riil, atau penurunan signifikan pada komponen PDRB lain seperti investasi dan ekspor. Sebaliknya, di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, penurunan konsumsi rumah tangga yang diiringi kenaikan PDRB kemungkinan besar disebabkan oleh lonjakan produksi dan ekspor dari sektor pertambangan yang dominan, atau adanya investasi besar-besaran di sektor tersebut yang

mendorong PDRB secara keseluruhan, meskipun manfaatnya belum sepenuhnya merata hingga ke tingkat konsumsi rumah tangga lokal.

Penelitian yang dilakukan Salsa Bila Puspandhari & Syamsul Huda, (2023), bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Timur. Penelitian yang dilakukan oleh Wida & Saharuddin, (2022) bahwa konsumsi rumah tangga tidak berpengaruh terhadap PDRB di provinsi Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Efendi & Rachmawati, (2024), bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Timur. Penelitian yang dilakukan oleh Christono & Putri, (2021), konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di provinsi DKI Jakarta. Liow et al., (2022), menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian ini memiliki keterbaruan dengan melihat pengaruh antara investasi pemerintah dan konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada 34 provinsi di Indonesia. Biasanya penelitian terdahulu cenderung memisahkan kedua variabel, Dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saya juga memiliki perbedaan antara salah satu variabel independen (x) yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan dari penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi terdapat beberapa hasil yang berbeda-beda di setiap variabel yaitu berpengaruh positif dan negatif terhadap PDRB di Indonesia.

Variabel yang berpengaruh negatif terhadap PDRB tidak selalu mampu menyelesaikannya secara signifikan. Misalnya, jika investasi pemerintah dan

konsumsi rumah tangga terus meningkat, namun PDRB justru menurun, ini akan memperburuk masalah ekonomi yang kita hadapi saat ini. Penurunan PDRB umumnya disebabkan oleh berkurangnya produksi barang dan jasa. Untuk mencegah hal ini, pemerintah perlu menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang efektif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan peningkatan produktivitas.

Variabel yang berpengaruh positif terhadap PDRB, akan mengarahkan bahwa hubungan variabel tersebut berpengaruh terhadap PDRB. Karena jika jumlah investasi pemerintah dan konsumsi rumah tangga naik setiap tahun dan jumlah PDRB meningkat, berarti investasi pemerintah yang dilakukan sesuai program yang di rencanakan, bahwa investasi pemerintah bertujuan untuk menstabilkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Indonesia, dengan masyarakat hidup berkecukupan dan fasilitas umum yang disediakan pemerintah merata maka rakyat Indonesia sejahtera.

Maka Dapat disimpulkan bahwa jika investasi pemerintah dan konsumsi rumah tangga meningkat seiring dengan pertumbuhan PDRB, maka variabel-variabel tersebut berpengaruh positif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika investasi pemerintah dan konsumsi rumah tangga meningkat namun PDRB menurun, hal ini menunjukkan pengaruh negatif karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Peneliti tertarik meneliti pengaruh investasi pemerintah dan konsumsi rumah tangga terhadap PDRB 34 provinsi di Indonesia karena minimnya penelitian

terkait, keinginan untuk memahami lebih dalam dinamika pengaruh kedua variabel tersebut, adanya pernyataan mengapa investasi yang rutin dialokasikan tidak maksimal meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan fakta yang berkembang, maka dilakukanlah penelitian yang berjudul, **“ Pengaruh Investasi Pemerintah dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Pada 34 provinsi di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas penelitian ini :

1. Seberapa besar pengaruh investasi pemerintah terhadap PDRB Pada 34 provinsi di Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap PDRB Pada 34 provinsi di Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh investasi pemerintah dan konsumsi rumah tangga terhadap PDRB Pada 34 provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh investasi pemerintah terhadap PDRB Pada 34 provinsi di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap PDRB Pada 34 provinsi di Indonesia

3. Untuk mengetahui secara Bersama pengaruh investasi pemerintah dan konsumsi rumah tangga terhadap PDRB Pada 34 provinsi di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk memperdalam pemahaman tentang mekanisme pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian lanjutan dalam konteks pengaruh sektor publik terhadap perekonomian.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif, terutama dalam hal kebijakan investasi dan konsumsi yang bertujuan untuk medorong pertumbuhan PDRB.
2. Bagi investor, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan investasi.